

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Sebagian negara berkembang termasuk Indonesia telah berusaha mengembangkan perekonomiannya selama 6 dekade dan telah menerangkan upaya yang besar untuk menciptakan pembangunan, akan tetapi pada umumnya usaha-usaha tersebut belum mencapai hasil seperti yang diinginkan.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan impian tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di pedesaan. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.<sup>2</sup>

Dengan menerbitkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa.<sup>3</sup> Munculnya kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Karena desa

---

<sup>1</sup>Sadono Sukoimo, *Ekonomi Pembangunan*, ( Jakarta: Prananda Media Group), 2010, h.4

<sup>2</sup>Chairil Anwar Pohan, *Managemen Perpajakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1

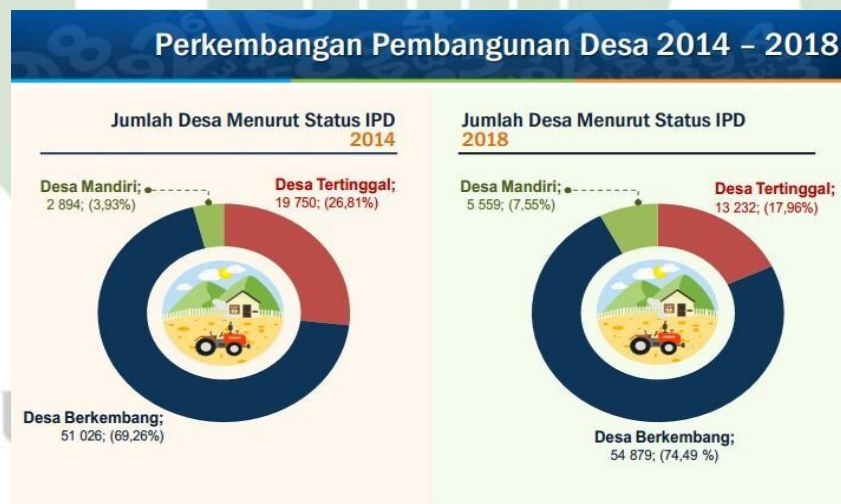
<sup>3</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa : Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Mentri Keuangan Republik Indonesia, 2017) , h.4

merupakan bagian penting dari entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Program dana desa ini bukan hanya pertama di Indonesia, namun juga pertama dan terbesar di dunia.<sup>4</sup>

Besarnya anggaran Dana Desa terus meningkat pada setiap tahunnya. Sejak tahun 2015 hingga 2019 saja, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun. Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 59,35 triliun (2017), 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, program ADD terbukti telah menunjukkan perkembangan di pedesaan.

Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014-2015

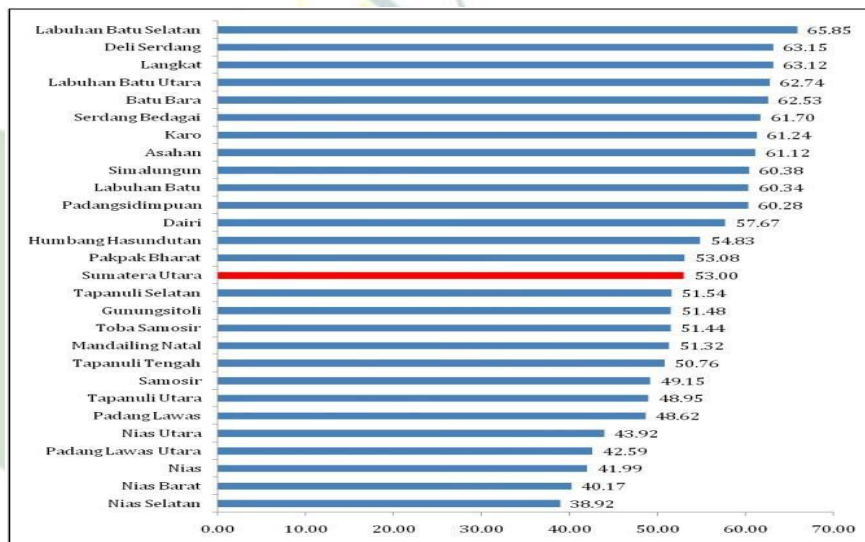


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2014

<sup>4</sup> Sri Mulyani, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017), h.2

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu wilayah besar di Indonesia dengan luas wilayah 72.981,23 km, dan tercatat memiliki tingkat penduduk terpadat. Pada tahun 2018-2019 saja ada 14.262.100 jiwa. Namun rata-rata indeks pembangunan desa di provinsi Sumatera Utara hanya sebesar 53,00 angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 55,69.<sup>5</sup>

Gambar 1.2  
Indeks Pembangunan



Sumber : Buku Pintar Dana Desa

Pembangunan ekonomi Sumatera Utara masih diwarnai oleh ketimpangan antar daerah sehubungan adanya kesenjangan baik dalam potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing

<sup>5</sup>Hindun Barokah, dkk., *Indeks Pembangunan Desa 2014*, Jakarta : Kementrian PPN/ Bappenas, 2015, h.42-43.

dimensi, provinsi sumatera utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 38,15.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Provinsi Sumatera Utara. Karena, desa ini terletak di kabupaten simalungun yang masi tercatat banyak kecamatan dan pedesaan yang tertinggal. Terkhusus simalungun bagian bawah, salah satunya di kecamatan hutabayu raja, kecamatan ini adalah salah satu daerah yang rawan bencana banjir.

Pemilihan ini juga didasarkan pada pengamatan peneliti kepada warga desa Manrayap Bayu saat menjalankan aktivitas kuliah kerja praktek (MAGANG). Sehubungan dengan desa dan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional.<sup>6</sup> Peneliti melihat bahwa masyarakat desa masi kesulitan dalam aktivitas ekonomi, lokasi yang pedalaman, sulitnya jangkauan menuju desa dan akses produksi pertanian yang belum memadai merupakan hambatan utama perekonomian desa manrayap bayu. Sebagai contoh akses jalan produksi pertanian, masyarakat sendiri untuk mencapai kebun pribadi harus menepuh jalanan yang masi sangat rusak dan untuk mengangkut hasil panen masyarakat membutuhkan banyak pekerja seperti tenaga pikul sehingga keuntungan hasil panen tidak maksimal dikarenakan menambah pengeluaran untuk upah para pekerja, belum lagi biaya perawatan tanaman yang mahal.<sup>7</sup> Itu sangat tidak efektif karena pengaruh dari pembangunan dan akses jalan produksi pertanian yang sulit dijangkau dan tidak

---

<sup>6</sup> UU No.14 Tahun 2016 tentang Desa

<sup>7</sup>Wawancara pribadi dengan ibu kanti, warga desa manrayap bayu (12 Juni 2020).

memadai. Selain itu, ADD juga ditujukan untuk membangun pusat perekonomian seperti membangun Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) tetapi pada kenyataannya BUMDes belum terealisasi.

Pemerintah desa juga menyatakan, dengan adanya program pemerintah yang memfokuskan pedesaan sebagai inti dari pembangunan nasional merupakan peluang besar bagi desa manrayap bayu dalam menyediakan fasilitas umum.<sup>8</sup> Akan tetapi anggaran dana desa dan pembangunan desa yang diharapkan belum tersedia normal belum bisa dirasakan oleh masyarakat, laju ekonomi masyarakat sendiri mengalami stagnan dan tidak berjalan dengan semestinya karena pengaruh dari fasilitas dan pembangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta mindset masyarakat yang tidak maju, minimnya minat belajar anak-anak desa, dan adanya konflik sosial bencana alam seperti banjir juga merupakan alasan mengapa peneliti memilih desa Manrayap Bayu sebagai objek penelitian. Selain itu, desa Manrayap merupakan desa yang termasuk dalam desa yang tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari besaran Alokasi Dana Desa yang didapat pada setiap tahunnya. Mulai tahun 2016 menerima ADD sebesar Rp 617.643.502, kemudian pada tahun 2017 menjadi Rp 740.269.700, kemudian pada tahun 2018 Rp 659.048.000, di tahun 2019 Rp 707.340.000 dan di tahun 2020 Rp 707.030.000.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> wawancara pribadi dengan Kepala Desa Manrayap Bayu, (Agus gunawan 14 Juni 2020),

<sup>9</sup> Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun 2016-2019

Tabel 1.1

Realisasi Pembangunan Desa Manrayap Bayu  
Tahun 2016-2018

No	Uraian Output	Volume Output	%Capaian Output
1	Pembangunan saluran air	3.379 Meter	100%
2	Pembangunan Jembatan	10 Meter	100%
3	Terbangunnya Jalan	1.396 Meter	100%
4	Pembangunan jalanbeton dan TPT	2,5x5, 2X0,3x12 Meter	100%
5	Pembangunan Paud	-	100%

Sumber : Laporan realisasi dan pencapaian output dana desa 2016-2018

Pada penelitian ini akan meneliti tentang analisis dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan laju ekonomi desa. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN LAJU EKONOMI DESA MANRAYAP BAYU, KEC.HUTABAYU RAJA, KAB.SIMALUNGUN, PROV.SUMATERA UTARA”**

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

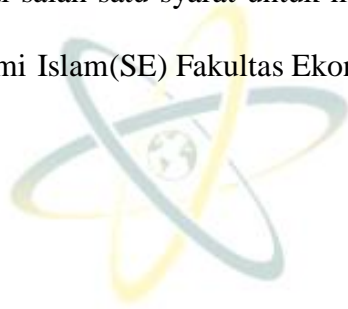
1. Strategi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara?
3. Bagaimanakah dampak program pembangunan desa kepada laju ekonomi desa di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi apasaja yang dilakukan aparatur desa dalam mengelola dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala apasaja yang dihadapi aparatur desa dalam mengelola dana desa di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara.
3. Menjelaskan kaitan pembangunan terhadap laju perekonomian masyarakat desa di Desa Manrayap Bayu, Kec.Hutabayu Raja, Kab.Simalungun, Prov.Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan dimasyarakat.
2. Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam(SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN